PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(**Studi Pada Desa se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo**)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh :
Putra Adi Kurniawan
NPM. 14.0102.0064

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Pada Desa se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh:
Putra Adi Kurniawan
NIM : 14.0102.0064

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Putra Adi Kurniawan

NPM 14.0102.0064

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal .....20 Agustus 2019.....

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. Ak.
Pembimbing I

Veni Soraya Dewi, SE. M.Si.
Pembimbing II

Tim Penguji

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc. Ak.
Ketua

Wawan Sadtyo N., S.E, M.Si., Ak., CA.
Sekretaris

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1

Tanggal, 26 SEP 2019

Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Putra Adi Kurniawan
NIM	: 14.0102.0064
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(Studi Pada Desa se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaanya).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 05 Agustus 2019

Peneliti



Putra Adi Kurniawan

NIM. 14.0102.0064

RIWAYAT HIDUP

Nama	: Putra Adi Kurniawan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir	: Kulon Progo, 26 Mei 1996
Agama	: Islam
Alamat	: Sideman RT.38/17, Giripeni, Wates, Kulon Progo
Email	: Putrakurniawan996@gmail.com
Pendidikan Formal	: -
Sekolah Dasar (2002-2008)	: SD Negeri 4 Wates
SMP (2008-2011)	: SMP Negeri 5 Wates
SMA (2011-2014)	: SMA Negeri 1 Galur
Perguruan Tinggi (2014-2019)	: S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang
Pengalaman Organisasi	:

- Anggota UKM Olahraga UMMgl

Magelang, 05 Agustus 2019
Penelit

Putra Adi Kurniawan
NIM. 14.0102.0064

MOTTO

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
(QS. Al-Baqarah 286)

Berdoa, berjuang dan berusaha.
(Sunarti)

Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat bagi semua orang.
(Anonim)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
(QS. Al-Insyirah: 6-8)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo)**" Skipsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai berbagai pihak, oleh karena itu
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dra. Marlina Kurnia, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Nur Laila Yuliani, SE, M.Sc, AK selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan nasehatnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang takter nilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Keluarga tercinta yang telah memberikan keceriaan, semangat dan doa.
6. Para perangkat Desa se Kecamatan Wates atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Magelang, 05 Agustus 2019
Peneliti



Putra Adi Kurniawan
NIM. 14.0102.0064

vi

DAFTAR ISI

Skripsi i
Lembar Persetujuan ii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi iii
Riwayat hidup iv
Motto v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar x
Daftar Lampiran xi
Abstrak xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kontribusi Penelitian 7
E. Sistematika Pembahasan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
A. Telaah Teori 10
1. Teori Agensi 10
2. Transparansi 11
3. Akuntabilitas 12
4. PPD 12
5. PKD 13
B. Telaah Penelitian Sebelumnya 13
C. Perumusan Hipotesis 15
D. Model Penelitian 19
BAB III METODA PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel 20
B. Data Penelitian 20
C. Variabel dan Pengukuran Variabel 21
D. Metoda Analisis Data 23
E. Pengujian Hipotesis 25
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 25
2. Uji F 25
3. Ujit 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sampel Penelitian 28
B. Statistik Deskriptif Responden 28
C. Deskriptif Variabel Penelitian 30
D. Uji Kualitas Data 31
1. Uji Validitas 31
2. Uji Reliabilitas 33
E. Analisis Regresi Linier Berganda 34

F. Uji Hipotesis..... 35
1.Uji Koefisien Determinasi (R^2)..... 35
2. Uji F 35
3. Uji t..... 36
G. Pembahasan..... 39
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan 43
B. Keterbatasan Penelitian..... 43
C. Saran..... 44
DAFTAR PUSTAKA..... 45
LAMPIRAN..... 47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan dan Pencairan Dana Desa.....4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....13
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel.....21
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....28
Tabel 4.2 Profil Responden.....29
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....30
Tabel 4.4 Cross Loading.....32
Tabel 4.5 Pengujian Reabilitas.....34
Tabel 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....34
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (R^2).....35
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....36
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian 19
Gambar 3.1 Penerimaan Uji F..... 26
Gambar 3.2 Penerimaan Uji t 27
Gambar 4.1 Hasil Penerimaan Uji F 36
Gambar 4.2 Uji t Variabel Transparansi 37
Gambar 4.3 Uji t Variabel Akuntabilitas 38
Gambar 4.4 Uji t Variabel Peran Perangkat Desa..... 38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner.....47
Lampiran 2. PenyebaranKuesioner 57
Lampiran 3. Tabulasi Data Mentah.....58
Lampiran 4. Tabulasi Data Diolah.....65
Lampiran 5. *Output SPS*.....*73*
Lampiran 6. Bukti PenyebaranKuesioner 85
Lampiran 7. Permohonan Riset.....86

ABSTRAK

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(**Studi Pada Desa se-Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo**)

Oleh:

Putra Adi Kurniawan

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitasi, peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Sampel penelitian ini adalah 7 Desa di wilayah Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan alat bantu SPSS versi 23.0. Hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: ***Transparansi, Akuntablitas, Peran Perangkat Desa, Pengelolaan Keuangan Desa***.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Hal ini juga dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Menurut Keuangan Desa yang berdasarkan Pasal 71 UU 6/2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan pemerataan pembangunan desa, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Berdasarkan data pemerintah mengalokasikan

dana desa sebesar Rp 20,7 triliun pada 2015. Selanjutnya anggaran meningkat menjadi Rp 46,9 triliun di periode 2016, dan naik lagi menjadi Rp 60 triliun di 2017.Dengan dana yang besar tersebut sangat rawan tejadi penyelewengan yang mengarah pada korupsi bagi aparatur desa itu sendiri. Dari data yang ada di indonesia sudah 215 kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas, transparansi, pertisipatif dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program Desa.

Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 Pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates.Kulon Progo dipandang Wamenkeu, Mardiasmo, memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan apa yang diinginkan dalam menjalankan UU Desa. Oleh karena itu Kulon Progo mendapatkan prioritas yang pertama dalam sosialisasi tentang kebijakan dana desa. “Kinerja yang baik tersebut juga ditunjukkan dengan didapatkannya dana insentif daerah untuk Kulon Progo, dimana semakin besar insentif artinya semakin baik kinerjanya, pinta Bupati”. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD II tahun 2015 sejumlah Rp 68,3 milyar sudah bisa terserap 100%, karena dari kabupaten berusaha mengirim dana ke desa awal mungkin. Untuk itu, Pemda Kulon Progo sudah mempersiapkan diri antara lain dengan mengatur tentang penghasilan tetap bagi perangkat desa, supaya bisa berkinerja lebih

baik. Selain itu untuk menyikapi UU Desa dan segala bentuk bentuk konsekuensinya, Kulon Progo sudah membuat 6 Perda yaitu perda SOTK perangkat desa, kades, perangkat desa, keuangan desa, penetapan desa, dan produk hukum desa (Kabupaten et al.).

Kecamatan wates yaitu kecamatan kecil dan berdekatan dengan pemerintahan kabupaten kulon progo yang terdiri dari 7 (tujuh) desa yang mendapat aliran dana desa. Berikut Lampiran penerimaan Dana Desa Kecamatan wates Kabupaten Kulon Progo, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Penerimaan dan Pencairan Dana Desa

No	Nama Desa	Dana Desa
1	Karangwuni	850.273.000
2	Sogan	802.738.000
3	Kulwaru	854.444.000
4	Ngestiharjo	890.696.000
5	Bendungan	874.797.000
6	Triharjo	899.124.000
7	Giripeni	904.664.000

Sumber data : PerBub No.3 tahun 2017(Bupati)

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemrintah. Penelitian Kumalasari (2016) tentang Transparasi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Pertanggugjawaban alokasi dana desa sudah baik secara teknis maupun

administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan dan kompetensi masih memiliki kendala sumber daya manusia dalam pengelolaan alokasi dana desa yang masih kurang berpengalaman dan masih membutuhkan pendampingan dari aparat pemerintah dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Penelitian Fajri dkk (2015) tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan. Dimana penggunaan dana yang digunakan untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa melebihi sekitar 32% dari 30% yang tertulis dan diamanatkan dalam peraturan. Perihal ini menjadikan jumlah dana untuk pemberdayaan juga berkurang menjadi 68% yang harusnya 70% dari jumlah yang ditentukan.

Penelitian ini mengacu pada peneilitian yang dilakukan oleh Umami & Nurodin (2017) tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan menunjukan hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Perbedaan penelitin ini yang **pertama** menambahkan variabel independen yaitu peran perangkat desa. Penggunaan variabel peran

perangkat desa dikarenakan perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat serta sumber daya yang dimilki desa setara baik yang bercirikan demokratis dan juga disentralistis (Indrianasari 2017). Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49.

Perbedaan **kedua** pada penelitian ini obyek penelitian yaitu pada Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. Alasan penggunaan obyek penelitian tersebut adalah dipemeritah desa Giripeni Wates Kulon Progo, berdasarkan audit yang dilakukan oleh audit LHP, terdapat permasalahan di neraca keuangan LKM Binangun Mandiri, dimana saldo akhir tidak sesuai dengan nilai modal awal sebesar Rp570 juta. Hal itu lalu ditindaklanjuti dengan pengaudit yang dilakukan oleh Irda Kulon Progo. Hasil dari pengauditan tersebut, dikeluarkan pada januari 2018. Oleh karena itu, penelitian tersebut mengambil sampel desa yang ada di kecamatan wates kabupaten Kulon Progo untuk pengetahui pengelolaan keuangan yang ada di desa se-kecamatan wates (Tribunnews.com).

B. Rumusan Masalah

1) Apakah transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa?

2) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa?

3) Apakah peran perangkat desaberpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap efektifitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap efektifitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peran perangkat desa terhadap efektifitas pengelolaan keuangan desa.

D. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhipengelolaan alokasi dana desa seKecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.
   b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi peran pemerintah desa di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo dalam pengelolaan keuangan desa

2. Manfaat praktis
   a. Bagi pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *good government* dan *good governance*.

b. Bagi pemerintah desa diKecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam pemerintah.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisa pokok-pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori hasil penelitian terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah teori

1. Teori Agensi

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents.* Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lainyaitu *agents*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principals*) memerintah orang lain (*agents*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *principals*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan principal (Jensen dan Meckling).

Pada Pemerintahan Daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, Teori Agensi sebenarnya telah dipraktikkan, pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah Pemerintah dan *agents* dalam hal ini adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya. Teori keagenan ini digunakan untuk mengawasi dan mengontrol aliran dana yang diperoleh dari pemerintah pusat yang diserahkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, perlunya teori tersebut yaitu untuk mengawasi pemerintah desa dalam

mengelola dan melaporkan dana desa tersebut.

2. Transparansi

Sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemrintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Menurut Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahdalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi

menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi (Kumalasari).

3. Akuntabilitas

Halim dan Ikbal (2012:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Mardiasmo (2012:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

4. Peran Perangkat Desa

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala

sumber daya yng kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis(Indrianasari, 2017).

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Soleh dan Rochmansjah (2015:3) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah Pengeloaan keungan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fajri (2015)	Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ketindan, Kecamtaan Lawang, Kabupaten Malang)	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perencanaan ditemukan penggunaan sasaran sedikit melebihi dari yang telah diterapkan dalam peraturan bupati dan Pelaksanaan ADD dalam perihal pemberdayaan desa melebihi yang sudah ada
2	Juniardi (2015)	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran alokasi dana desa di kecamatan teluk pandan kabupaten kutai timur	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa variabel partisipatif transparansi akuntabel dan berkelanjutan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu
(lanjutan)

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Hendri et.al (2016)	Pengaruh Sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana terhadap kinerja pengelolaan Keuangan desa di kabupaten lombok tengah	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
4	Kumalasari (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
5	Putra (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Hasil yang diperoleh yakni Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa
6	Umami, Risya Nurodin, Idang (2017)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil yang diperoleh yakni Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa
7	Indrianasari, 2017	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (studi padaDesa Karangsari Sukodono)	Hasil yang diperoleh yakni Peran Perangkat Desa dalam akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
8	Setiana Yuliana (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Hasil yang diperoleh yakni berpengaruh positif tehradap akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa.

Sumber: Data Penelitian Terdahulu diolah, 2017

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan dalam sebuah pelaporan keuangan didalam pemerintahan maupun di sektor swasta. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, PSAP No. 1 menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Menurut PP No. 24 tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparasi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah berupa laporankeuangan daerah kepada pengguna laporan pemerintah. Sasaran

pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundangundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Desa sebagai agen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan juga kepada masyarakat karena merupakan pertanggungjawaban publik. Pemerintah Desa memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan akuntabilitas untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan, demi terlaksananya transparansi keuangan kepada publik sesuai peraturan yang berlaku. Tugas para pegawai dalam menyusun laporan keuangan di dalam instansi Pemerintah Desa harus mematuhi peraturan yang berlaku salah satunya yaitu PP No. 24 Tahun 2005. Apabila penyajian laporan keuangan dilaksanakan sesuai PP No. 24 tahun 2005 maka akan tercipta transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas.

Transparansi yang baik maka dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa akan baik. Berdasarkan Penelitian Umami & Nurodin (2017), Juniardi (2015) Hendri et.al (2016), Kumalasari (2016) dan Putra (2017) menunjukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis :

H1. Transparansi Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2010) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelasanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Agar pemerintah dapat menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang baik maka pemerintah Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umami & Nurodin (2017), Hendri et.al (2016), Kumalasari (2016) dan Putra (2017) menjukan

bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Dari hasil tersebut memperoleh bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, makadapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H2. Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa Berpengaruh Positif terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Peran perangkat desa adalah dimana sekumpulan atau sekelompok orang yang berkerja di dalam suatu instansi tertentu dan juga ikut serta dalam membuat laporan-laporan yang ada. Berdasarkan teori keagenan (Jensen dan Mecking, 1976). hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut.

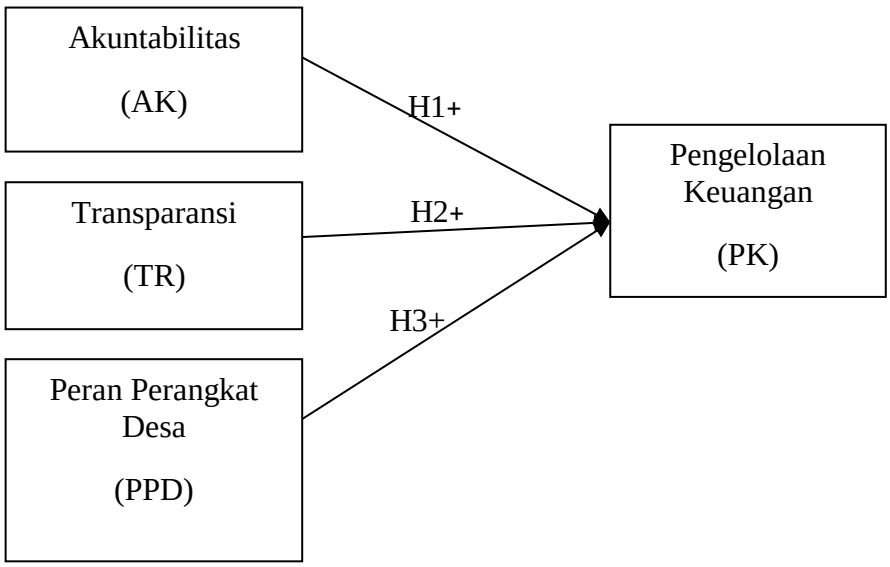
Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (asymmetrical information) karena agent berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Untuk mengurangi konflik keagenan tersebut maka perlu adanya partisipatif dalam pengelolaan dan penyaluran alokasi dana desa dikarenakan aktivitas

agen dalam hal ini perangkat desa dapat berjalan dengan baik apabila ada partisipasi dari semua pihak khususnya masyarakat dalam mendukung pelaksanan alokasi dana desa tersebut sehingga partispasi menyebabkan konflik dalam keagenan bisa teratasi.

Penelitian Juniardi, dkk (2015), Indrianasari (2017), Setiana & Yuliani (2017) menunjukan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap efektifitas penyaluran alokasi dana desa. Berdasarkan uraiantersebut, maka dapat iturunkan hipotesis sebagai berikut:

H3. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan Keuangan Desa.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di lingkungan desa se-Kecamatan Wates. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang ditentukan peneliti. Pengambilan sampel ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur Umum, Kasi Pembangunan, Kasi pemerintahan, Perencanaan Dan Keuangan (tidak disemua desa ada) dan Kepala dusun atau Kadus yang terkait dengan pengelola keuangan desa yang ada di Balai Desa untuk masing-masing desa. Penentuan kriteria responden ini dikarenakan pihak yang terkait berhubungan secara langsung dengan pengelolaan keuangan di tiap-tiap Desa.

B. Data Penelitian

a. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer. Penelitian metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015). Data primer adalah kegiatan pengambilan data

dimana sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2012 : 139).

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang akan dituju. Setelah kuesioner yang diisi terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyeleksi kuesioner yang tidak lengkap agar tidak ikut serta dalam analisis.

C. Variabel penelitian dan Pengukuran variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitan dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1	T**ransparansi**	transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemrintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya	Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator 3 aspek pelaksanaan dan 2 aspek Pengumuman kebijakan diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chrystiana, 2017).

Tabel 3.1
Variabel Penelitan dan Pengukuran Variabel
(lanjutan)

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
2	**Akuntabilitas**	kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.	Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator 3 aspek pelaporan dan 2 aspek pengawasan dan pertanggungjawaban diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chrystiana, 2017).
3	**Peran Perangkat Desa**	Pengeloaan keungan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa	Instrumen 9 butir pernyataan dengan indikator 2 aspek pemahaman dan peraturan terkait dana desa serta 7 aspek pemahaman tugas pengelolaan keuangan desa serta tanggung jawab diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chandra, 2016).
Variabel Dependen :			
4	**Pengelolaan Keuangan Desa**	pengelolaan keuangan desa adalah Pengeloaan keungan desa (APBDesa) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban	Instrumen 56 butir pernyataan dengan indikator 18 aspek perencanaan, 21 aspek pelaksanaan, 7 aspek penatausahaan dan 3 aspek pelaporan serta 7 aspek pertanggung jawaban diukur dengan menggunakan skala likert 1- 4 (Chandra, 2016).

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

   Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasai, varian, *maksimum, minimum, sum, range, kurtosiws,* dan *skewness* (Ghozali, 2018). Kurtosis dan *skewness* merupakan ukuran untuk melihat apakah data terdistribusi normal apakah tidak. *Skewness* mengukur kemencengan dari data dan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Statistik deskriptif memberikan gambaran terperinci mengenai profil responden meliputi : jenis kelamin, tingkat pendidikan, jabatan, dan lamanya kerja..

2. Uji Kualitas Data

   a. Uji Validitas

      Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan *confirmatory factor analysis* (CFA). CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasikan sebuah variabel. Hal ini tentunya dihubungkan dengan indikator yang mampu menjelaskan variabelnya. Analisis faktor konfirmatori mengelompokkan masing-masing indikator kedalam beberapa faktor apabila yang digunakan indikator konstruk, kemudian denngan melihat dari nilai faktor *loading*-nya. Syarat yang harus dipenuhi, pertama, *loading factor* harus signifikan. Oleh karena *loading factor* yang signifikan bisa jadi masih rendah nilainya, maka *standardized loading estimated* harus sama dengan 0.05

atau lebih, dan idealnya harus 0.07 Ghozali (2018). Jadi *item* pertanyaan yang memiliki *loading factor* > 0,50 dapat dikatakan valid

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner merupakan kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari waktu ke waktu dikatakan konsisten. Pengujian secara reabilitas suatu kuesioner untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*> 0,70 Ghozali (2018).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

a. Regresi Linear Berganda

Regresi berganda adalah suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependen (kecenderungan *fraud)* dan beberapa variabel independen (efektivitas Pengendalian internal, keseuaian kompensasi, budaya etis, Ketaatan aturan akuntansi, moralitas individu, dan penegakan hukum).

Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut:

$$PK = \alpha + \beta\,1.AK + \beta 2.TR + \beta 3.PPD + e$$

Keterangan :

PK	= Pengelolaan keuangan
a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
TR	= Transparansi
AK	= Akuntabilitas
PPD	= Peran Perangkat Desa
e	= *Error*

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas Ghozali (2018).

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan *adjusted* R2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai adjusted R2 semakin mendekati 1 maka semakin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel independen.

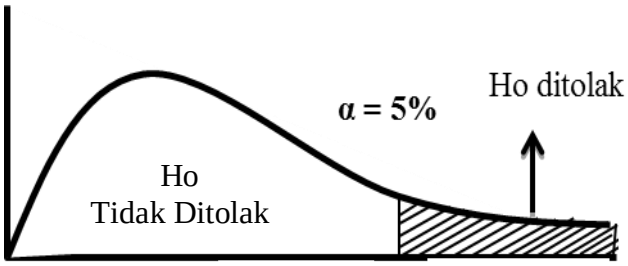
b. Uji F (G*oodness of Fit*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F

menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak Ghozali (2018). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang df = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1 dimana k adalah jumlah variabel bebas.pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1. Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau p *value* < α = 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
2. Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau p *value* > α = 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.



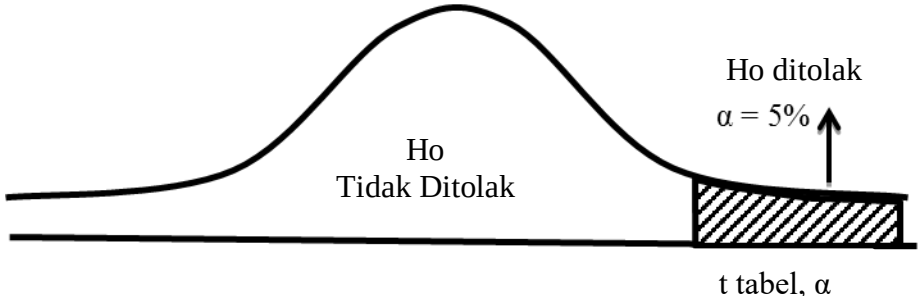
Tabel F
Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan

berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = n-1 (Ghozali, 2018).

1. Jika t hitung > t tabel atau *p value*<α = 0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika t hitung < t tabel atau *p value*>α = 0,05, maka Ho tidak ditolak atau Ha tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 93 kuesioner yang dapat diolah. Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variable transparansi, akuntabilitas, dan peran perangkat desa dalam menjelaskan Pengelolaan Keuangan Desa hanya beberapa persen saja sedangkan sisannya dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel di luar penilitian ini. Hasil dari uji t menunjukan bahwa variabel transparansi dan variabel akuntabilitas berpengaruh positif dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan variabel dari perangkat desa tidak berpengaruh dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan sampel. Yang mana lingkup dalam menyebarkan sampel masih belum bisa meluas, hanya sebatas di kecamatan wates.
2. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden pada kuesioner yang disebarkan. Hasil dari olah data hanya dapat sesuai dengan jawaban di dalam kuesioner saja. Peraturan yang selalu berubah-ubah menjadi faktor berubahnya jawaban tersebut.

C. Saran

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini kurang meluas.Diharapkan penelitian selanjutnya menambah populasi sampel.
2. Penelitian selanjutnya dalam membuat kuesioner untuk memperhatikan peraturan-peraturan yang baru tentang pengelolaan kauangan desa, agar penelitian yang dilakukan lebih akurat dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

Bupati, Peraturan 2017. PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017. 2017.

Chandra,Putu N. 2016. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Bentuk Implementasi UU No. 6 Tahun 2014.Skripsi. Mataram : Program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram.

Chrystiana, Ema. 2017. Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo.Skipsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamInstitut Agama Islam Negeri Surakarta.

Dwiyanto, Agus. 2006. Transparansi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fajri, Rahmi. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Administrasi Publik.studentjournal.ub.ac.id

Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hadiriyanto. 2013. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran Di Universitas Bina Nusantara. eprints.binus.ac.id

Hendri, Sapto BS. 2016.Pengaruh Sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana terhadap kinerja pengelolaan Keuangan desa di kabupaten lombok tengah.journal e-ISSN NO: 2541-2850

Hidayat, Rahmad. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. e-journal.unp.

Indrianasari, 2017. PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA KARANGSARI KECAMATAN SUKODONO). 2017, pp. 29–46.

Jensen dan Meckling. “The Theory Oh Te Firm: Manajerial Behaviour,Agency Cost, and Ownership Structure.” Journal of Financial and Conomic, 3:305-360, 1976.

Jurniadi. 2015. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur, e-journal Administration Reform Hal 112-124

Kabupaten, Pemerintah, et al. Wamenkeu Nilai Kinerja Kulon Progo Bagus. 2018, pp. 1–2.

KPK.ac.id."Kasus Korupsi di Indonesia.2017

Kumalasari, deti 2016. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM. Vol. 5, no. November, 2016.

Mardiasmo. "Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akun Tansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governace." Jurnal Akuntansi Pemerin Tahan Vol. 2, No.1, 2006.

Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Ofsett.

Moenir, H.A.S. 1992.Manajemen Pelayanan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Nuzul Ibnu Hajar. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Anggaran Pada Uptd Taman Budaya Sulawesi Tenggara." E-Journal.unhalu, 2017.

Peraturan Pemerintah nomor. 72 tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c tentang Desa

Putra, I. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1(Vol : 8 No : 2 Tahun 2017)

Putu, I. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng. ejournal.undiksha.ac.id

Setiana dan Yuliani. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat DesaTerhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, 2012.

---. "Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (Untuk Perbaikan Kinerja Dan Pengembangan Ilmu Tindakan)." 1, edited by M.Ed. Safitri Yosita Ratri, S.Si, M.Pd., 1st ed., Alfabeta, 2015.

Umami, Risya, and Idang Nurodin. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Vol. 6, 2017, pp. 74–80.

Wahyuni, Putu Sri, et al. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Vol. 2, no. 1, 2014.